

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan teknologi di dunia terus terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, namun juga pada negara-negara berkembang bahkan juga di negara dunia ketiga. Perubahan terhadap proses kegiatan masyarakat yang disebabkan perubahan yang besar dalam teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan di organisasi dan masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia, sejak tahun 2014 telah menggulirkan dana desa kepada seluruh pemerintahan desa di Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya dana desa, diharapkan Pemerintah Desa dapat melakukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

APBN Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp68 Triliyun untuk Dana Desa yang disebar kepada 74.961 Desa di seluruh Indonesia. Jika dirata-ratakan, maka pada tahun 2022 setiap desa di Indonesia akan menerima sekitar Rp907 Juta rupiah untuk dikelola. Hal ini belum termasuk jumlah pendapatan lain yang menjadi kewenangan desa seperti pendapatan asli desa, pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota, dana bagi hasil dan pendapatan lainnya yang sah.

Konsekuensi dari pengelolaan anggaran pemerintah oleh Desa, maka desa harus dapat melakukan pengelolaan secara akuntabel dan memberikan pertanggungjawaban yang layak kepada para stakeholder mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa dapat memanfaatkan tools yang dapat membantu Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa agar lebih akuntabel dan transparan yaitu aplikasi Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes). Siskeudes adalah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah digunakan oleh seluruh Pemerintah Desa di Indonesia.

Untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai hasil yang diharapkan oleh para stakeholder yang berkaitan dengan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus diawasi secara memadai. Pengawasan Desa dilakukan oleh beberapa pihak yaitu: Badan Pemusyawaratan Desa, Camat, Bupati, Inspektorat / APIP dan Masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan desa oleh Bupati melalui Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu dilakukan secara efektif, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh APIP untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh desa di wilayah Kabupaten/kota masing-masing. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya APIP terhadap pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menciptakan sistem informasi pengawasan dana desa yang disebut sebagai Siswaskeudes (Sistem Informasi Pengawasan Desa). Sistem ini mampu mengakses data pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa di aplikasi Siskeudes untuk dilakukan pengawasan melalui pengujian-pengujian yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memberikan nilai tambah kepada Bupati/Walikota dan stakeholder lainnya dalam akuntabilitas pengelolaan desa oleh Pemerintah desa.

Hal ini sejalan dengan kemajuan (revolusi) di bidang teknologi yang memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap setiap aspek dalam bisnis (termasuk manajemen operasi). Khususnya teknologi informasi secara dramatik telah mengubah cara dalam proses perencanaan dan pengelolaan operasi baik untuk sektor manufaktur maupun jasa. Dalam hal ini, teknologi informasi memberikan

kontribusi bagi keberhasilan operasi organisasi khususnya dalam memasuki era digital ekonomi dan teknologi.

Manajemen Proyek pada saat ini dapat dirasakan sebagai sebuah langkah strategis yang membedakan antara kesuksesan satu bisnis. Manajemen proyek menjadi semakin dibutuhkan oleh organisasi seiring dengan berkembangnya filosofi *lean management* yang diterapkan dalam teknik manajemen proyek. Perusahaan-perusahaan yang berhasil diyakini mendapatkan keberhasilannya dengan melakukan perubahan-perubahan manajemen secara proaktif untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan perusahaan yang berubah. Metode manajemen proyek yang baik berhubungan erat dengan penciptaan nilai bagi perusahaan yang menghasilkan kinerja organisasi dengan lebih baik (Lailic et.al 2013)

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diamanatkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayahnya. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten dan Camat. APIP Lampung Timur adalah unit Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Kabupaten Lampung Timur memiliki 264 desa pada 21 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang menjadi objek pengawasan pengelolaan keuangan desa. Setiap tahun, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mengagendakan kegiatan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada 30 desa sampel pada setiap tahun pada PKP2T (Perencanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan).

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Penerapan sistem informasi yang baru tersebut belum diikuti dengan perencanaan strategis bagaimana implementasi siswaskeudes ini dapat membantu inspektorat mencapai tujuan-tujuan pengawasan. Dengan adanya rencana penerapan siswaskeudes maka ada kebutuhan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Timur untuk menyusun rencana manajemen proyek implementasi pengawasan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan penelaahan dokumen terkait dengan implementasi Siswaskeudes di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

Penentuan judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya berdasarkan pada masalah yang telah ditetapkan. Prof Sugiyono (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik (menyeluruh) maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul penelitian kualitatif yang baik justru berubah, atau mungkin diganti. Judul penelitian kualitatif yang tidak berubah berarti peneliti belum mampu menjelajah secara mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti sehingga belum mampu mengembangkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dana desa di Kabupaten Lampung Timur menggunakan aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) dengan menerapkan manajemen proyek sebagai metode pelaksanaan pengawasan dana desa. Penelitian digunakan Penulis menggunakan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai

lokasi studi kasus karena telah melaksanakan pengawasan desa menggunakan Siswaskeudes.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditentukan dalam sebuah penelitian untuk memandu proses penelitian. Secara umum data yang diperoleh melalui penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 2013). Tujuan penelitian ini didefinisikan dalam kerangka sebagai berikut:

“Penelitian dilakukan untuk memberikan saran Prosedur Manajemen Proyek dalam implementasi Siswaskeudes pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.”

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Prof Sugiyono (2013) dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (*in context*). Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada tahap awal penelitiannya, kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan ditelitinya. Ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut “*emergent design*” (Lincoln dan Guba, 1985)

Dari fenomena yang diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana proses implementasi manajemen proyek yang dapat diterapkan dalam Sistem Siswaskeudes pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.”

Pertanyaan penelitian tersebut dijabarkan dalam sub pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Siswaskeudes
2. Apa saja risiko atau halangan yang dapat mengancam keberhasilan implementasi Siswaskeudes?
3. Bagaimana proses manajemen pengawasan dana desa menggunakan siswaskeudes dapat dioptimalisasi?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam mengantisipasi masalah yang mungkin akan timbul dalam implementasi Siswaskeudes dan membantu memberikan solusi berupa prosedur manajemen proyek yang dapat diterapkan dalam proyek pengawasan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siswaskeudes.